



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Dampak Kesenjangan Akses Bimbingan Belajar terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia

Martini^{1*}, Iqbal Arpanudin²

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, martini16fisip.2025@student.uny.ac.id

²Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, arpannudin@uny.ac.id

*Corresponding Author: martini16fisip.2025@student.uny.ac.id

Abstract: Fulfilling citizens' right to education is one of the primary goals of the state. This study aims to analyze the impact of disparities in access to tutoring services on the fulfillment of citizens' educational rights using a Systematic Literature Review (SLR) method. Literature searches were conducted through several databases such as Google Scholar, Scopus, SINTA, and Taylor & Francis within the period of 2020–2025. The findings show that disparities in access to tutoring reflect structures of social injustice that lead to unequal fulfillment of the right to education. Financial capacity is the main factor in accessing tutoring services. Children from low-income families are unable to access tutoring consistently, resulting in lower academic achievement. Conversely, children from financially stable families who can consistently access tutoring tend to have better academic performance. In addition to economic factors, geographical conditions including difficult access to schools, lack of educational facilities, low teacher motivation, differences in social status, religion, economy, and differing perspectives on education also exacerbate the unequal fulfillment of citizens' educational rights. This disparity contradicts UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 and 2, which mandate that every citizen has the right to education and that the government is obligated to finance basic education.

Keywords: Educational Inequality, Tutoring, Right to Education

Abstrak: Pemenuhan hak pendidikan warga negara menjadi salah satu tujuan utama negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kesenjangan akses bimbingan belajar terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara dengan metode penelitian *Systematic Literature Review* (SLR). Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data seperti *Google Scholar*, *Scopus*, *SINTA* serta *Taylor dan Francis* dalam rentang waktu 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan akses bimbingan belajar mencerminkan struktur ketidakadilan sosial yang menyebabkan hak pendidikan tidak terpenuhi secara setara. Kemampuan finansial menjadi faktor utama dalam mengakses bimbingan belajar. Anak-anak dari keluarga yang ekonominya rendah tidak dapat mengakses bimbingan belajar secara konsisten sehingga akan lebih rendah prestasi belajarnya. Sebaliknya anak-anak dari keluarga yang ekonominya memadai dapat mengakses bimbingan belajar secara konsisten akan memiliki prestasi belajar yang lebih baik. Selain faktor ekonomi, kondisi geografis meliputi

sulitnya akses ke sekolah, kurangnya fasilitas sekolah, rendahnya minat guru, perbedaan status sosial, agama, ekonomi, dan perbedaan perspektif tentang pendidikan juga memperluas ketidakmerataan pemenuhan hak pendidikan warga negara. Kesenjangan akses bimbingan belajar ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kata Kunci: Kesenjangan Pendidikan, Bimbingan Belajar, Hak Pendidikan

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi aspek penting hingga dijadikan salah satu tujuan negara. Seiring perkembangan zaman, teknologi, pendidikan dan ilmu pengetahuan terus mengalami perubahan. Kurikulum pendidikan Indonesia selalu mengalami perubahan, hal ini harus dijalani dan disesuaikan dengan perkembangan zaman (Sari, Pifianti, & Chairunissa, 2023: 138). Tidak hanya terkait kurikulum, kemudahan akses pendidikan juga harus menjadi perhatian khusus. Karena kemudahan akses pendidikan dapat mengatasi kemiskinan. Akses pendidikan utamanya pendidikan dasar penting untuk setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan pengambilan keputusan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Akan tetapi berdasarkan Indeks Kemajuan Sosial (SPI) yang merupakan alat penilai kemajuan sosial termasuk akses pendidikan dasar mengungkapkan adanya kesenjangan pendidikan antar provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi berkinerja baik sementara yang lain menghadapi tantangan dalam menyediakan kesempatan pendidikan yang setara (Haidir & Setyari, 2024: 453-454). Selain permasalahan akses pendidikan antar provinsi yang mengalami ketimpangan juga terdapat permasalahan terkait kualitas pendidikan.

Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia terutama di daerah terpencil masih menjadi tantangan utama. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya infrastruktur, ketidaksesuaian kebijakan dan hambatan sistemik lainnya. Faktor seperti akses terbatas ke infrastruktur fisik dan digital, kurangnya pelatihan guru, serta ketiadaan kurikulum lokal yang relevan memperparah situasi ini. Ketimpangan ini juga diperkuat oleh kesenjangan digital yang semakin terlihat selama pandemi COVID-19, di mana anak-anak di daerah terpencil kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan teknologi dan konektivitas. Meskipun beberapa solusi telah diusulkan dalam literatur, seperti kebijakan pendidikan alternatif, inovasi teknologi, dan keterlibatan komunitas lokal, implementasinya masih belum konsisten dan sering kali tidak berkelanjutan (Wijayati, Damanik, & Prawirosastro, 2025: 676). Terbatasnya infrastruktur digital, kurangnya keterampilan teknologi dan perbedaan ekonomi menjadi hambatan utama dalam pendidikan digital (Muslimin & Indrawati, 2024: 377).

Kesenjangan akses pendidikan sangat terlihat di wilayah pelosok Indonesia. Infrastruktur sekolah dan akses jalan di daerah tersebut perlu diperbaiki untuk memudahkan akses belajar anak-anak dan guru yang mengajar di daerah tersebut. Selain itu juga masih terdapat banyak faktor penghambat akses pendidikan lainnya yang tidak seimbang dengan fasilitas pendidikan yang berada di pusat kota. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah rendahnya kualitas sarana sekolah dan tenaga pengajar, infrastruktur, jumlah dan kualitas buku, serta mahalnya biaya pendidikan. Oleh karena itu percepatan Standarisasi Pendidikan melalui Sekolah Berstandar Nasional (SBN) sangat penting untuk menciptakan generasi dan pemimpin bangsa yang berkualitas. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dalam mengakses pendidikan untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau (Sinta & Iqbal, 2023: 17).

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sedang berada dalam keadaan yang kurang baik. Hasil survey PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*), PISA (*Programme for International Student Assessment* atau *Program Penilaian Pelajar Internasional*), dan *Global Human Capital Report* menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan pelajar dari negara-negara lainnya (Omayra, 2021: 92). Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kompetensi para pendidik dalam menggali potensi peserta didik. Selain itu masalah efisiensi dan kurangnya standarisasi pengajaran yang juga terlihat dari minimnya fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru masih rendah, prestasi siswa belum optimal, ketimpangan pendidikan dan mahal biaya pendidikan. Terakhir permasalahan kurikulum yang cenderung bersifat sentralistik sehingga membuat arah pendidikan terlihat semakin kurang jelas (Patandung & Panggua, 2022: 798).

Pada konteks pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia, pendidikan yang seharusnya hak publik yang fundamental menjadi digerakkan oleh pasar dan hanya dapat diakses oleh kelompok-kelompok tertentu. Adanya bimbingan belajar yang mahal, sistem penerimaan yang bias prestasi dan pesatnya pertumbuhan sekolah internasional yang mahal merupakan bukti nyata bahwa pendidikan bukan lagi hak publik yang fundamental bagi warga negara. Kondisi tersebut tidak hanya membatasi akses pendidikan bagi masyarakat miskin tetapi juga menormalisasikan ketimpangan (Sari, et al., 2025: 357-358). Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya masalah keberadaan fisik fasilitas atau guru, tetapi juga kemampuan finansial dan kepercayaan pada kualitas pendidikan formal, yang jika tidak diperhatikan akan memperparah ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua warga negara.

Selain itu, terdapat dampak akademik dari ketidaktersediaan atau ketidakmampuan siswa memperoleh bimbingan belajar yang memadai. Studi internasional meta-analisis mengenai pengaruh intervensi bimbingan belajar swasta (*private tutoring*) menunjukkan bahwa intervensi seperti ini secara signifikan dapat meningkatkan prestasi akademik siswa, Hal ini memperlihatkan bahwa bagi mereka yang tidak punya akses bimbingan belajar tambahan, potensial kenaikan prestasi menjadi terhambat (Zhang & Liu, 2022). Karena bimbingan belajar privat sebagai pendukung bagi siswa untuk peningkatan prestasi akademik siswa (Alam & Zhu, 2022: 8). Hasil penelitian tentang analisis dampak kesenjangan akses bimbingan belajar terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia ini akan berimplikasi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan dan pengembangan pembelajaran untuk mewujudkan pemerataan hak pendidikan kedepannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang dirancang untuk mengidentifikasi, menyaring, menyeleksi, dan mensintesis literatur yang relevan secara transparan dan tuntas, mengikuti tahapan identifikasi, skrining, eligibility, inklusi, dan analisis data agar hasilnya dapat dievaluasi kepercayaan dan relevansinya (Page et al., 2021: 1-2). Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data seperti Google Scholar, Scopus, SINTA dan Taylor & Francis dengan kata kunci “kesenjangan akses bimbingan belajar”, “hak pendidikan Indonesia”, “*tutoring*” dan “*shadow education*” dalam rentang waktu 2020-2025. Kriteria pemilihan literatur meliputi artikel ilmiah bereputasi, relevan dengan konteks pendidikan Indonesia atau internasional yang dapat dibandingkan, dan membahas akses bimbingan belajar atau ketimpangan pendidikan. Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan judul, abstrak, dan isi. Kemudian artikel memenuhi kriteria dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk akses layanan bimbingan belajar, faktor penyebab ketimpangan akses dan dampaknya terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia. Peneliti pada tahap awal menemukan 383 artikel kemudian diskrining dengan membaca judul dan abstrak jumlah artikel menjadi 27. Selanjutnya setelah diseleksi dengan cara menelaah isi untuk

memastikan kesesuaian tema dan kualitas data artikel menjadi tersisa 14 artikel. Hasil akhirnya terdapat 8 artikel yang sangat relevan dan digunakan sebagai sumber utama analisis. Artikel tersebut adalah 2 artikel dari Google Scholar atau Sinta, 6 artikel dari Scopus dan 2 artikel dari Taylor & Francis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan belajar berbayar, baik secara tatap muka maupun secara online atau daring pada dasarnya merupakan layanan pendukung utama pendidikan formal. Bimbingan belajar juga berfungsi sebagai pendukung utama peningkatan pemahaman dan prestasi akademik siswa. Namun berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa akses layanan bimbingan belajar tidak dapat dinikmati secara merata. Perbedaan finansial atau ekonomi, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta kondisi fisik mempengaruhi sejauh mana siswa dapat mengikuti bimbingan belajar secara konsisten. Ketidaksetaraan akses layanan bimbingan belajar berdampak langsung hasil belajar antar kelompok siswa. Jadi layanan bimbingan belajar juga menjadi indikator penting untuk mengetahui sejauh mana hak pendidikan di Indonesia dapat terpenuhi secara adil. Berikut ini delapan karya ilmiah yang relevan untuk dianalisis agar dapat mengetahui lebih mendalam terkait kesenjangan akses bimbingan belajar dan kaitannya dengan hak pendidikan warga negara.

Tabel 1. Hasil Penelitian Kesenjangan Akses Bimbingan Belajar dan Hak Pendidikan

Peneliti dan Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian
Yung (2020)	<i>Investing in English private tutoring to move socially upward: a narrative inquiry of an underprivileged student in Hong Kong</i>	Akses bimbingan belajar privat berkontribusi pada peningkatan kesenjangan pencapaian pembelajaran bahasa di berbagai latar keluarga.
Zwier, D., Geven, S., & van de Werfhorst, H. G (2021)	<i>Social inequality in shadow education: The role of high-stakes testing</i>	Semakin meluasnya pendidikan bayangan di seluruh dunia, penelitian menunjukkan bahwa siswa dari latar belakang status sosial ekonomi (SES) tinggi lebih banyak berpartisipasi dalam pendidikan bayangan dibandingkan siswa dari latar belakang SES kurang mampu
Adugna, et al, (2022)	<i>Children with disabilities in Eastern Africa face significant barriers to access education: a scoping review</i>	Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas mendesak pembentukan pendidikan inklusif dan perluasan kesempatan pendidikan untuk memaksimalkan akses pendidikan anak-anak penyandang disabilitas. Namun, lebih dari 90% dari 150 juta anak-anak penyandang disabilitas tidak memiliki akses pendidikan. Sebaliknya, mereka dibiarkan tanpa partisipasi sekolah, khususnya di negara-negara berkembang dan lingkungan berpenghasilan rendah.
Bray, M. (2022)	<i>Shadow education in Asia and the Pacific: Features and implications of private supplementary tutoring</i>	Semakin banyak pengajaran dan pembelajaran terstruktur yang berlangsung di luar sistem sekolah formal. Sebagian besar pengajaran dan pembelajaran ini berbentuk bimbingan belajar tambahan privat yang dapat diberikan secara individual, dalam kelompok kecil, di kelas besar, dan/atau melalui internet. Penyediaan semacam ini umumnya disebut pendidikan bayangan karena sebagian besar isinya meniru kurikulum di

		sekolah seiring perubahan kurikulum di sekolah, kurikulum di sekolah pun ikut berubah. Berdasarkan perspektif yang lebih luas, bimbingan belajar cenderung mempertahankan dan memperburuk ketimpangan sosial karena keluarga kaya dapat memperoleh pendidikan bayangan yang lebih banyak dan lebih baik daripada rekan-rekan mereka yang berpenghasilan rendah.
Cathrin, et al., (2023)	<i>The Problem of Affordable Education in Indonesia: The Emergence of Online Tutoring Service in Primary Education Level</i>	Permasalahan kualitas pembelajaran yang kurang maksimal di sekolah formal menjadi peluang masuknya berbagai macam layanan bimbingan belajar daring. Berbeda dengan pembelajaran di lembaga pendidikan formal yang menerapkan aturan ketat dalam hal pembelajaran, layanan bimbingan belajar daring menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi dari segi keterjangkauan layanan bimbingan belajar daring lebih terlihat seperti mesin bisnis daripada alat bantu belajar siswa. Pendidikan pada akhirnya menjadi milik mereka yang berkecukupan secara finansial. Siswa harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar layanan bimbingan belajar daring, membayar kuota internet, dan membeli alat bantu belajar seperti ponsel. Bukan pendidikan gratis yang berkembang, melainkan pendidikan yang dinikmati oleh mereka yang berkecukupan atau kaya. Ketika pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh orang-orang berduit, dapat dikatakan bahwa pendidikan hanya milik orang kaya. Sementara itu, di sisi lain, pendidikan semakin langka bagi kalangan menengah ke bawah. Ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi milik semua orang seolah menjadi monopoli kalangan menengah ke atas.
Hujaimah, et al (2023)	Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan.	Kesenjangan pendidikan Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sulitnya akses ke sekolah, kurangnya fasilitas sekolah, rendahnya minat guru, perbedaan status sosial, agama, ekonomi, dan perbedaan perspektif tentang pendidikan.
Amanda & Mahidin (2023)	Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Di SMP Perguruan Islam Amalia Medan	Bimbingan belajar secara signifikan meningkatkan prestasi belajar siswa. Semakin sering mengikuti bimbingan belajar, semakin tinggi capaian akademik siswa.
Moriyasu et al., (2025)	<i>Realizing the right to education for all: Approaches to removing barriers based on gender, disability, and</i>	Kesenjangan global yang besar masih terjadi dalam akses dan pencapaian pendidikan, dan disparitas gender, disabilitas, dan status sosial ekonomi masih sangat besar. Semua negara telah berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan

<i>socioeconomic status in 193 countries</i>	dasar dan menengah universal melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, hanya lima tahun tersisa untuk mencapai SDGs, ratusan juta anak dan remaja masih putus sekolah dan hanya sedikit informasi yang tersedia mengenai apakah negara-negara telah mengadopsi kebijakan berbasis bukti untuk memajukan pemerataan pendidikan. Terdapat variasi perlindungan yang signifikan berdasarkan tingkat pendapatan dan wilayah negara.
--	---

Beberapa hasil penelitian diatas menunjukkan pola konsisten bahwa kesenjangan akses bimbingan belajar yang terjadi merupakan cerminan dari ketimpangan keadaan sosial dan ekonomi warga negara. Status sosial merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakatnya yang mencakup lingkungan sosialnya, peran yang dijalankan serta hak dan kewajibannya. Tingkat pendapatan, pendidikan, dan kekuasaan menjadi dasar penggolongan status sosial ekonomi seseorang (Diansyah, Khairinal, & Rosmiati, 2022: 733). Penelitian internasional menunjukkan bahwa siswa dari latar belakang status sosial ekonomi tinggi lebih banyak berpartisipasi dalam pendidikan bayangan dibandingkan siswa dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi rendah (Zwier, Geven, & van de Werfhorst, 2021). Penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Bray (2022) yang menyatakan bahwa bimbingan belajar tidak hanya mempertahankan tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, karena keluarga berpenghasilan menengah keatas dapat memperoleh pendidikan bayangan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Bimbingan belajar yang seharusnya sebagai pendukung peningkatan mutu pendidikan dan prestasi siswa justru berpotensi memperluas dan memperparah ketidaksetaraan pendidikan warga negara. Bimbingan belajar pada akhirnya mencerminkan struktur ketidakadilan sosial yang menyebabkan hak pendidikan tidak terpenuhi secara setara.

Hasil penelitian di Indonesia saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa bimbingan belajar daring semakin populer. Bimbingan belajar daring fleksibel dan praktis tetapi layanan tersebut juga lebih mudah diakses oleh keluarga kalangan menengah keatas yang memiliki kemampuan finansial memadai. Dari latar belakang keluarga yang mampu membayar biaya langganan bimbingan belajar, biaya kuota internet, serta memiliki perangkat digital yang memadai (Cathrin, et al., 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa antara faktor ekonomi dan akses pendidikan saling berkaitan dan memperkuat temuan hasil penelitian Zwier, Geven, dan van de Werfhorst (2021) serta hasil penelitian Bray (2022) bahwa kemampuan finansial warga negara menjadi faktor utama dalam pemerataan hak pendidikan warga negara. Fenomena ini menunjukkan kesamaan realitas global dengan realitas nasional terkait dengan pendidikan yang bersifat eksklusif dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Akses bimbingan belajar privat berkontribusi pada peningkatan kesenjangan pencapaian pembelajaran (Yung, 2020). Artinya mayoritas anak-anak dari keluarga yang ekonominya rendah tidak dapat mengakses bimbingan secara konsisten akan lebih rendah prestasi belajarnya. Sebaliknya anak-anak dari keluarga yang ekonominya memadai dapat mengakses bimbingan belajar secara konsisten akan memiliki prestasi belajar yang lebih baik. Sesuai dengan hasil penelitian Amanda dan Mahidin (2023) yang menegaskan bahwa semakin sering siswa mengikuti bimbingan belajar maka semakin tinggi prestasi akademik yang dicapai. Maka dapat diketahui kesenjangan akses bimbingan belajar berkontribusi terhadap ketimpangan capaian hasil pembelajaran atau prestasi antara anak dari keluarga kalangan bawah dengan anak dari keluarga kalangan menengah keatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya dapat mewujudkan keadilan. Karena anak dari keluarga yang ekonominya rendah tidak dapat mencapai potensi akademik yang optimal.

Selain faktor ekonomi kesenjangan pemenuhan hak pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor geografis. Sulitnya akses menuju sekolah, minimnya fasilitas sekolah, rendahnya minat guru, perbedaan status sosial, agama, ekonomi, dan perbedaan pandangan tentang pendidikan menjadi faktor geografis yang mendorong perluasan kesenjangan pemenuhan hak pendidikan di Indonesia (Hujaimah, et al, 2023). Kesenjangan hak pendidikan juga terjadi pada para penyandang disabilitas terdapat lebih dari 90% dari 150 juta anak-anak penyandang disabilitas tidak memiliki akses pendidikan. Anak-anak tersebut dibiarkan tidak bersekolah, khususnya di negara-negara berkembang dan lingkungan berpenghasilan rendah (Adugna, et al., 2022). Meskipun semua negara telah berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan dasar dan menengah universal melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, hanya lima tahun tersisa untuk mencapai SDGs, ratusan juta anak dan remaja masih putus sekolah dan hanya sedikit informasi yang tersedia mengenai apakah negara-negara telah mengadopsi kebijakan berbasis bukti untuk memajukan pemerataan pendidikan (Moriyasu et al., 2025). Jadi kesenjangan akses pendidikan ini tidak hanya karena faktor ekonomi dan faktor geografis tetapi juga bisa disebabkan oleh keragaman kondisi sosial dan fisiknya.

Secara keseluruhan hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesenjangan akses bimbingan belajar di Indonesia mencerminkan belum terwujudnya keadilan dalam pemenuhan hak pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan harus dijadikan prioritas sebagai investasi jangka Panjang karena pendidikan merupakan alat perkembangan ekonomi, pendidikan memberikan nilai balik, pendidikan memiliki fungsi sosial-ekonomi, politis, budaya serta kependidikan (Sudarmono, Hasibun & Anwar Us, 2021: 276-277). Berdasarkan hasil penelitian internasional dan nasional tersebut dapat ditegaskan bahwa akses bimbingan belajar merupakan ketimpangan sosial yang universal. Oleh karena itu perlu pengembangan kebijakan pendidikan yang dapat menjangkau kelompok berpenghasilan rendah agar pendidikan berkualitas dapat diakses merata dan hak pendidikan warga negara terpenuhi secara adil sesuai prinsip keadilan sosial.

KESIMPULAN

Kesenjangan akses bimbingan belajar di Indonesia berdampak signifikan terhadap perluasan ketidakmerataan pemenuhan hak pendidikan warga negara. Pemenuhan hak pendidikan warga negara belum terwujud secara adil dan merata. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi akses bimbingan belajar. Anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan bimbingan belajar berbayar secara konsisten. Kondisi tersebut berdampak pada hasil akademik, anak-anak yang tidak dapat mengakses bimbingan belajar secara konsisten cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih rendah daripada anak-anak yang dapat mengakses bimbingan secara konsisten. Selain faktor ekonomi, kondisi geografis meliputi sulitnya akses menuju sekolah, minimnya fasilitas sekolah, rendahnya minat guru, perbedaan status sosial, agama, ekonomi, dan perbedaan pandangan tentang pendidikan juga memperluas ketidakmerataan pemenuhan hak pendidikan warga negara. Berdasarkan *Systematic Literatur Review* (SLR) menunjukkan bahwa akses bimbingan belajar yang seharusnya sebagai pendukung peningkatan mutu pendidikan dan prestasi siswa justru memperluas dan memperparah ketidaksetaraan pemenuhan hak pendidikan warga negara. Kondisi kesenjangan akses bimbingan belajar ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkeadilan akses bimbingan

belajar agar hak pendidikan setiap warga negara Indonesia dapat terpenuhi secara maksimal dan merata.

REFERENSI

- Adugna, M., Ghahari, S., Merkley, S., & Rentz, K. (2022). Children with disabilities in Eastern Africa face significant barriers to access education: a scoping review. *International Journal of Inclusive Education*, 28(10), 2281–2297. <https://doi.org/10.1080/13603116.2022.2092656>
- Alam, M. B., & Zhu, Z. (2022). Shadow education and its academic effects in Bangladesh: A Vygotskian perspective. *Frontiers in psychology*, 13(922743), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.922743>
- Amanda, Putri & Mahidin. (2023). Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Di SMP Perguruan Islam Amalia Medan. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(03), 546–556. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i03.4872>
- Bray, M. (2022). *Shadow education in Asia and the Pacific: Features and implications of private supplementary tutoring*. In W. O. Lee, P. Brown, A. L. Goodwin, & A. Green (Eds.), *International Handbook on Education Development in Asia-Pacific* (pp. 1–23). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2327-1_10-1
- Cathrin, S., Hanum, F., Dwiningrum, S. I. A., Efianingrum, A., Suyantiningsih, S., & Hayashi, M. (2023). The Problem of Affordable Education in Indonesia: The Emergence of Online Tutoring Service in Primary Education Level. *Jurnal Prima Edukasia*, 11(2), 215–224. <https://doi.org/10.21831/jpe.v11i2.59830>
- Diansyah, R., Khairinal, K., & Rosmiati, R. (2022). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga, Biaya Pendidikan Dan Motivasi Belajar Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Melanjutkan Program S2 Pada Mahasiswa Fkip Universitas Jambi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 728–739. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1135>
- Haidir, A. A., & Setyari, N. P. W. (2024). Indonesia social progress: the role of access to basic education in escaping from poverty trap. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 428–457. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19810>
- Hujaimah, S., Fadhilah, A. A., Sasmita, R. F. P., Salsabila, 'Aisyah N., Mariani, M., Nugraha, D. M., & Santoso, G. (2023). Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(6), 142–148. <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i6.1231>
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XII Tentang Pendidikan, Pasal 31 Ayat 1 dan 2.
- Moriyasu, C., Cassola, A., Sprague, A., Raub, A., & Heymann, J. (2025). Realizing the right to education for all: Approaches to removing barriers based on gender, disability, and socioeconomic status in 193 countries. *International Journal of Educational Development*, 117, 103348. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2025.103348>
- Muslimin, M., & Indrawati, R. A. (2024). *Digitalization and Education Equity in Remote Areas: Challenges and Strategic Solutions*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 376–383. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2356>
- Omayra, Y. (2021). Dimensions and Strategies to Improve The Quality Of Education And Its Impact On The Development Of Community Human Resources: Dimensi dan Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Dampaknya Bagi Pengembangan SDM Masyarakat. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(2), 77–94. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i2.114>
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance

- and exemplars for reporting systematic reviews. *bmj*, 372. 1-36. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/277>
- Sari, I. K., Pifianti, A., & Chairunissa, C. (2023). Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Fase A Pada Tema Bhineka Tunggal Ika. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13(2), 138–147. <https://doi.org/10.24246/j.js.2023.v13.i2.p138-147>
- Sari, K. A., Fajriani, S. W., Gunawan, G., Zulqoifah, A., & Hartani, M. (2025). The commodification of education and inequality in Indonesia: A sociological perspective. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(8), 349-362. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.623>
- Sinta, Tiara Della & Iqbal M. (2023). Kesenjangan Sosial Dalam Mengakses Pendidikan Di Bengkulu. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 8(1), 1–18. <https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/847>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Wijayati, I. W., Damanik, F. H. S., & Prawirosastro, C. L. (2025). Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(3), 671-677. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/view/4370>
- Yung, K. W. H. (2020). Investing in English private tutoring to move socially upward: a narrative inquiry of an underprivileged student in Hong Kong. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 41(10), 872-885. <https://doi.org/10.1080/01434632.2019.1660667>
- Zhang, E., & Liu, Y. (2022). Effects of private tutoring intervention on students' academic achievement: A systematic review based on a three-level meta-analysis model and robust variance estimation method. *International journal of educational research*, 112, 101949. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101949>
- Zwier, D., Geven, S., & van de Werfhorst, H. G. (2021). Social inequality in shadow education: The role of high-stakes testing. *International Journal of Comparative Sociology*, 61(6), 412-440. <https://doi.org/10.1177/0020715220984500>